PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK BEKERJA DAN ANGKA KETERGANTUNGAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

SUKANDI
NIM. B101121156

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Sukandi
NIM	:	B1011211156
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja Dan Angka Ketergantungan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 3 Juni 2025



Sukandi

NIM. B1011211156

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Sukandi
NIM	:	B1011211156
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	:	21 Mei 2025
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja Dan Angka Ketergantungan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 23 Juni 2025

Sukandi
NIM. B1011211156

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja dan Angka Ketergantungan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Sukandi
B1011211156

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 21 Mei 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si NIP 197505212002122001	27 mei 2025	
2.	Ketua Penguji	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si NIP 196312091989031004	26 mei 2025	
3.	Anggota Penguji	Rio Laksamana, S.E., M.E. NIDN 1110098503	26 mei 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 03 JUN 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah **" Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja Dan Angka Ketergantungan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat "**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, membimbing, mendukung, dan memberikan saran, masukan, serta doa. Dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Erni Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Rio Laksamana, S.E., M.E. selaku dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses admnistrasi demi kelancaran tugas akhir ini.

9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hadenan dan Ibu Mariana, yang telah menjadi panutan hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah henti, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Gelar Sarjana ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan penghargaan atas segala pengorbanan dan ketulusan Bapak dan Ibu.

   Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Paman tercinta, Iwansyah, atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran Paman menjadi sumber semangat tambahan dalam menyelesaikan studi ini. Gelar ini penulis persembahkan pula sebagai bentuk terima kasih dan rasa hormat yang tulus.
10. Saudari tercinta, adik satu-satunya Susanti terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyusunan tugas akhir ini. Kehadiran dan perhatianmu menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis selama menjalani perjalanan ini..
11. Partner spesial penulis, Feby Dwi Yanti terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan tugas akhir ini, menjadi *support system* dan sosok pendamping dalam segala hal, meluangkan waktu, menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, menghibur, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih impian penulis.
12. Teman *The Best* yaitu Octaviati Putri dan Setia Lestari, yang telah hadir sejak awal masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, berbagai masukan positif, serta dukungan yang kalian berikan selama ini. Kehadiran dan interaksi yang terjalin telah memberikan pengaruh baik bagi penulis, terutama dalam menyelesaikan proses penulisan Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman Internal 21: Noami, Grvan, Rafli, Septi, dan Salsa, yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama dua periode organisasi. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan rasa kekeluargaan yang terbangun, serta pelajaran berharga yang diberikan. Pengalaman suka dan duka yang telah dilewati bersama menjadi bagian penting yang memperkaya proses ini dan memberikan dorongan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
14. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan: Agustian, Erik Andrean, Adventus Dwi Bernando, Gevan Mars, dan Rafiyansyah. Kalian semua telah banyak membantu, memberikan semangat, dan setia mendengarkan keluh kesah saya. Bersama kalian, saya

menemukan banyak pengalaman berharga dan pintu-pintu baru yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, terutama berkat keberanian dan ajakan yang selalu kalian berikan.

15. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi wadah penulis untuk belajar hal-hal baru dan mengenal lebih banyak pengalaman serta cerita seru.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan. Terkhusus teman-teman kelas C, terima kasih atas bantuannya dari masa mahasiswa baru hingga sekarang.
17. Kemudian, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
18. Terakhir terima kasih kepada diriku sendiri sudah bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Masukan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini agar menjadi lebih baik.

Pontianak, 23 Juni 2025



Sukandi
NIM. B1011211156

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK BEKERJA DAN ANGKA KETERGANTUNGAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Angka Ketergantungan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t yang dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-kuantitatif, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angka Ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Inflasi tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja produktif dan keberhasilan kebijakan daerah dalam menstimulasi ekonomi dapat mendorong penerimaan pajak daerah, bahkan di tengah tingginya beban penduduk usia non-produktif. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang memperkuat sektor ketenagakerjaan tetap menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja, Angka Ketergantungan.

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK BEKERJA DAN ANGKA KETERGANTUNGAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Sukandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat, namun masih tertinggal dibanding provinsi lain seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Data menunjukkan penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan Kota Pontianak menjadi penyumbang terbesar dan Kayong Utara terendah. Inflasi yang bervariasi antarwilayah menjadi tantangan, sementara jumlah penduduk bekerja sangat penting dalam menentukan penerimaan pajak daerah karena mereka menjadi wajib pajak. Angka ketergantungan juga berpengaruh, di mana beban penduduk usia tidak produktif dapat mengurangi kapasitas fiskal namun juga menjadi potensi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inflasi, jumlah penduduk bekerja, dan angka ketergantungan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Kalimantan Barat, dengan data periode 2019-2023 yang menunjukkan perbedaan ekonomi antarwilayah dan potensi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya penerimaan pajak daerah Kalimantan Barat dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, yang membuat daerah ini masih bergantung pada transfer pusat. Ketimpangan antarwilayah juga menjadi tantangan, terlihat dari perbedaan penerimaan pajak yang cukup besar antara kota/kabupaten. Selain itu, inflasi yang bervariasi, ketidakseimbangan jumlah penduduk yang bekerja, serta angka ketergantungan yang tinggi pada beberapa daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Permasalahan ini menjadi fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana inflasi, jumlah penduduk yang bekerja, dan angka ketergantungan memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat.

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk bekerja terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis Angka Ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel (gabungan data lintas kabupaten/kota dan waktu) yang dilakukan di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2023, menghasilkan 70 observasi menggunakan data sekunder dari BPS dan DJPK. Variabel dependen adalah penerimaan pajak daerah, sedangkan variabel independen adalah inflasi, jumlah penduduk yang bekerja, dan angka ketergantungan. Data dianalisis menggunakan regresi data panel di Eviews 12 dengan model persamaan log-linear, dan dilakukan uji pemilihan model (Chow, Hausman, dan LM) untuk menentukan model terbaik (CEM, FEM, REM). Pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji t parsial) dan uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) dilakukan untuk memastikan validitas model dan hubungan antarvariabel.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan uji Chow, Hausman, dan LM. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan dan negatif, sementara jumlah penduduk yang bekerja dan angka ketergantungan signifikan serta positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat. Uji asumsi klasik menunjukkan model regresi layak dan sahih, dengan koefisien determinasi (Adjusted R^2 = 0,935261) yang menunjukkan bahwa 93,52% variasi penerimaan pajak dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Pengujian hipotesis parsial mengonfirmasi bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja dan angka ketergantungan berpengaruh positif signifikan.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Inflasi (INF)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat, dengan koefisien negatif (0,0113) dan p-value 0,6961 ($p > 0,05$). Meskipun inflasi sering dihubungkan dengan daya beli masyarakat dan stabilitas harga, pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah tidak signifikan selama periode penelitian. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan seperti operasi pasar murah dan penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga kestabilan pasokan pangan. Selain itu, pengaruh inflasi yang tidak signifikan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan fiskal yang telah disesuaikan dengan kondisi inflasi.

2. Jumlah Penduduk yang Bekerja (JPB)

Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dengan koefisien positif sebesar 1,5296 dan p-value 0,0000 ($p < 0,05$). Semakin banyak penduduk yang bekerja, semakin besar penerimaan pajak daerah yang dapat dikumpulkan, terutama dari pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif berpotensi memperluas basis pajak daerah. Peningkatan jumlah pekerja di sektor formal, serta kebijakan penciptaan lapangan kerja yang efektif, akan memperbesar kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak daerah, terutama melalui peningkatan daya beli masyarakat dan pajak konsumsi.

3. Angka Ketergantungan (AK)

Angka ketergantungan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dengan koefisien positif sebesar 0,0254 dan p-value 0,0151 ($p < 0,05$). Meskipun angka ketergantungan tinggi sering dianggap sebagai beban ekonomi karena banyaknya penduduk usia tidak produktif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang aktif bekerja, dampak negatifnya dapat diminimalkan. Kualitas penduduk usia kerja, serta kebijakan fiskal yang mendukung produktivitas, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa peningkatan angka ketergantungan tidak mengurangi penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural dan kebijakan ekonomi yang tepat bisa memperbaiki potensi penerimaan pajak meski angka ketergantungan meningkat.

4. Rekomendasi

Adapun saran yang diberikan bagi lembaga pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan. Inflasi di Kalimantan Barat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun stabilitas harga tetap penting untuk keberlanjutan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan harga kebutuhan pokok, operasi pasar murah, dan penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha yang stabil. Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor padat karya, penguatan UMKM, serta peningkatan akses pelatihan vokasi dan pendidikan keterampilan untuk memperluas basis wajib pajak dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Terakhir, meskipun angka ketergantungan tinggi, hal ini tidak menghambat penerimaan pajak daerah karena didukung oleh produktivitas penduduk usia kerja yang memadai. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat produktivitas penduduk usia kerja melalui peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kebijakan yang mendukung akses pendidikan dan kesehatan, guna memastikan keberlanjutan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan ekonomi.

DAFTAR ISI

PERYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 KAJIAN LITERATUR 4
2.1 Tinjauan Teori 4
2.2 Tinjauan Empiris 7
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 8
BAB 3 METODE PENELITIAN 8
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 12
4.1 Hasil Penelitian 12
4.2 Pembahasan 15
BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI 19
5.1 Kesimpulan 19
5.2 Rekomendasi 20

DAFTAR RUJUKAN 20
LAMPIRAN 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, ... 2
Tabel 2 Definisi Operasional Variabel 9
Tabel 3 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik 12
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model (FEM) 12
Tabel 5 Uji Normalitas 13
Tabel 6 Uji Multikolinearitas 13
Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 14
Tabel 8 Hasil Uji Signifikansi t 14
Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (R2) 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 8

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK BEKERJA DAN ANGKA KETERGANTUNGAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Sukandi*
Universitas Tanjungpura, Indonesia

[2]Dr. Restiatun, SE.M.Si
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Inflation, Number of Employed Population, and Dependency Ratio on Regional Tax Revenue in West Kalimantan Province for the period 2019–2023. This study employs panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach, and hypothesis testing is carried out using the t-test with the assistance of EViews 12 software. The research is descriptive-quantitative in nature, utilizing secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The findings indicate that both the Number of Employed Population and the Dependency Ratio contribute positively and are statistically significant in influencing Regional Tax Revenue, while Inflation has no significant effect. These findings indicate that increasing the productive workforce and the success of local government economic policies can enhance tax revenue, even amidst a high burden of non-productive age population. Therefore, employment-focused development strategies remain key to optimizing regional tax revenue in West Kalimantan.

Keywords: Regional Tax Revenue, Inflation, Employment, Dependency Ratio.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Angka Ketergantungan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t yang dianalisis menggunakan perangkat lunak *EViews* 12. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-kuantitatif, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angka Ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Inflasi tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja produktif dan keberhasilan kebijakan daerah dalam menstimulasi ekonomi dapat mendorong penerimaan pajak daerah, bahkan di tengah tingginya beban penduduk usia non-produktif. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang memperkuat sektor ketenagakerjaan tetap menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Inflasi, Jumlah Penduduk Bekerja, Angka Ketergantungan.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam pembangunan dan layanan publik di tingkat kabupaten/kota. Sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, pajak daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola pendapatan sendiri (Nasir, 2019; Anggara dkk, 2024). Peningkatan PAD yang berkelanjutan

* 1 b101121156@student.untan.ac.id

memungkinkan daerah membiayai pemerintahan tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat seperti DAU dan DAK. Selain itu, pajak daerah memiliki efek multiplier yang signifikan terhadap ekonomi lokal, terutama melalui pembiayaan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong sektor perdagangan dan pariwisata (Dwiastuti, 2018; Azizah & Asmara, 2023). Optimalisasi penerimaan pajak memungkinkan kebijakan fiskal yang lebih mandiri dan transparan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mencegah kebocoran pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. (Purnawan & Adillah, 2014; Saraswati & Nurharjanti, 2021).

Kesenjangan penerimaan pajak antar provinsi di Kalimantan masih terlihat, di mana Kalimantan Timur mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp6,868 Triliun, diikuti Kalimantan Selatan Rp4,86 Triliun, Kalimantan Tengah Rp2,25 Triliun, dan Kalimantan Utara Rp0,72 Triliun yang berhasil melampaui targetnya pada 2023 (Diskominfo Kalimantan Timur, 2023; Benuanta, 2024). Sementara itu, Kalimantan Barat menghadapi tantangan dengan penerimaan pajak Rp2,63 Triliun, sehingga masih bergantung pada transfer pusat. Pada 2023, realisasi PAD Kalimantan Barat mencapai Rp3,22 Triliun atau 98,88% dari target Rp3,26 Triliun, Adapun kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,71 Triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,73 Triliun, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mencapai Rp0,77 Triliun. (DPDKB, 2023). Dibandingkan Kalimantan Timur yang mencapai PAD Rp9 Triliun pada 2022 berkat sektor pertambangan dan energi, serta Kalimantan Selatan Rp4,7 Triliun, Kalimantan Barat masih tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi sumber daya alam, kebijakan fiskal adaptif, serta peningkatan investasi infrastruktur untuk memperkuat penerimaan pajak daerah. Berikut Tabel 1 yang menyajikan penerimaan pajak daerah di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2019–2023.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat,

2019 – 2023 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/ kota	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sambas	53,86	31,06	40,52	38,87	79,04	48,67
Bengkayang	15,83	14,96	16,87	21,68	20,67	18,00
Landak	39,21	45,54	28,76	23,53	22,97	32,00
Mempawah	34,75	33,85	36,94	79,73	76,97	52,45
Sanggau	37,94	37,74	43,43	54,17	65,46	47,75
Ketapang	102,61	130	159,95	115,32	152,13	132,00
Sintang	54,63	31,12	44,9	41,67	57,68	46,00
Kapuas Hulu	14,2	12,58	14,64	16,46	18,19	15,21
Sekadau	11,89	12,52	13,58	14,85	27,34	16,04
Melawi	18,91	9,95	14,6	15,19	18,1	15,35
Kayong Utara	5,95	5,31	5,69	6,32	6,66	5,99
Kubu Raya	126,46	108,26	117,41	150,24	146,88	129,85
Pontianak	332,14	258,67	273,92	349,6	384,19	319,70
Singkawang	55,88	48,29	54,43	69,68	76,54	60,96

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023

Berdasarkan Tabel 1 dari tahun 2019-2023, Kota Pontianak mencatat penerimaan pajak tertinggi di Kalimantan Barat dengan rata-rata Rp319,70 Miliar, diikuti Kubu Raya Rp129,85 Miliar dan Ketapang Rp132 Miliar, menunjukkan dominasi wilayah perkotaan dan strategis dalam kontribusi

PAD. Sedangkan Kayong Utara mencatat penerimaan terendah dengan rata-rata hanya 5,99 Miliar, mencerminkan perbedaan potensi ekonomi antarwilayah.

Inflasi yang tinggi dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, karena daya beli masyarakat yang melemah dapat mengurangi kemampuan mereka membayar pajak (Natsir dkk, 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah bervariasi, di mana beberapa studi menemukan tidak adanya dampak signifikan (Eko & Sunardi, 2018; Putra dkk., 2020; Umniati, 2020; Yusuf, 2022; Sitinjak, 2016), sementara penelitian lainnya menunjukkan dampak positif (Nadhiroh, 2018) atau negatif (Simbolon & Herijawati, 2023), tergantung pada karakteristik ekonomi daerah. Selama periode 2019–2023, inflasi di Kalimantan Barat juga menunjukkan variasi antar wilayah, dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sekadau mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,92%, sementara Kota Singkawang memiliki inflasi terendah sebesar 2,50% (BPS, 2023). Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, infrastruktur, dan dinamika pasar di setiap daerah yang turut mempengaruhi kapasitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan optimalisasi penerimaan pajak.

Jumlah penduduk yang bekerja berperan krusial dalam menentukan kapasitas pajak daerah, karena individu yang bekerja memiliki penghasilan dan menjadi wajib pajak. Peningkatan jumlah pekerja, terutama dengan pendapatan per kapita yang tinggi, dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak dan berkontribusi pada penerimaan pajak daerah. Studi terdahulu menunjukkan hasil beragam terkait pengaruh tenaga kerja terhadap pajak, di mana beberapa penelitian menemukan hubungan positif (Maznawaty dkk., 2015; Susila & Pradhani, 2022; Ashari & Iriani, 2024), sementara penelitian lain tidak menemukan dampak signifikan (Herawati & Saipudin, 2023; Gautama, 2024). Selama periode 2019–2023, jumlah penduduk bekerja di Kalimantan Barat bervariasi, dengan Kabupaten Sambas mencatat jumlah pekerja tertinggi rata-rata 286.431 jiwa, diikuti oleh Kota Pontianak 280.797 jiwa, sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki jumlah pekerja terendah, rata-rata 56,424 jiwa (BPS, 2023). Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja di berbagai daerah.

Faktor lain yang tidak dapat diabaikan terhadap penerimaan pajak daerah adalah angka ketergantungan, terutama akibat tingginya jumlah Anak-anak berusia di bawah 15 tahun termasuk dalam kategori usia tidak produktif. Beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif semakin besar dalam kondisi ini, memengaruhi alokasi sumber daya pemerintah daerah yang lebih banyak diarahkan pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Rohana dkk., 2017). Peningkatan angka ketergantungan yang tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan pendapatan per kapita karena berkurangnya jumlah penduduk yang menghasilkan pendapatan dan membayar pajak. Dalam jangka pendek, tingginya rasio ketergantungan dapat mengurangi kapasitas fiskal daerah, meskipun dalam jangka panjang, generasi muda yang memasuki usia produktif dapat memperluas basis pajak. Studi sebelumnya menunjukkan hasil beragam, di mana Ashari & Iriani (2024) serta Yusuf (2022) menemukan hubungan positif antara jumlah penduduk dan PAD, sementara Simbolon & Herijawati (2023) menemukan dampak negatif akibat meningkatnya beban ketergantungan bagi penduduk yang bekerja.

Pada periode 2019–2023, Kabupaten Landak mencatat angka ketergantungan tertinggi di Kalimantan Barat dengan rata-rata sebesar 42,42%, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di daerah tersebut menanggung sekitar 42 penduduk usia belum produktif (usia 0–14

tahun). Hal ini mencerminkan beban demografis yang cukup tinggi terhadap kelompok usia kerja,Sebaliknya, Kabupaten Melawi memiliki angka ketergantungan terendah dengan rata-rata 35,20%, artinya beban yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif hanya sekitar 35 orang usia belum produktif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa daerah dengan angka ketergantungan tinggi, seperti Landak, berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dalam jangka pendek, yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Namun, dalam jangka panjang, angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi peluang bagi peningkatan penerimaan pajak ketika generasi muda memasuki usia kerja. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, jumlah penduduk yang bekerja, dan angka ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Musgrave (1959), pajak merupakan instrumen utama dalam keuangan negara yang digunakan untuk mengalihkan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik guna memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan efisiensi alokasi sumber daya. Pajak bersifat memaksa dan wajib, di mana setiap warga negara atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak memiliki kewajiban hukum untuk membayarnya. Pemungutan pajak dilandasi oleh undang-undang yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menarik kontribusi dari masyarakat tanpa imbalan langsung. Artinya, meskipun tidak ada balas jasa secara spesifik bagi pembayar pajak, masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung berupa penyediaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak daerah merupakan kewajiban kontribusi dari individu maupun badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pembangunan di daerah, serta untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Penerimaan pajak daerah diukur per tahun, berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (DJP, 2023).

2.1.1.2 Karakteristik Pajak

Pajak memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk kontribusi lainnya, berdasarkan Mardiasmo (2016). Karakteristik pertama adalah pajak bersifat memaksa, yang berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk menagih pajak dari Wajib pajak harus mengikuti peraturan yang berlaku, dan dapat dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, artinya meskipun wajib pajak membayar pajak, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang spesifik sebagai balasannya, seperti yang terjadi pada transaksi jual beli barang atau jasa. Ketiga, pajak bersifat universal, yang artinya pajak dikenakan kepada seluruh warga negara atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, tanpa membedakan status sosial atau posisi ekonominya. Karakteristik keempat adalah pajak digunakan untuk kepentingan umum, yaitu untuk membiayai kebutuhan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membiayai berbagai program publik yang bermanfaat untuk umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.